

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang  
©2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	II-1
2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II .....	II-1
2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 .....	II-6
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	II-6
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .....	II-6
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .....	II-7
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .....	II-7
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah .....	II-8
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	II-8
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	II-9
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	II-9
B. Program Kepegawaian Daerah .....	II-10
1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN .....	II-10
2. Mutasi dan Promosi ASN .....	II-12
3. Pengembangan kompetensi ASN .....	II-13
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur .....	II-15
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BKD Kabupaten Pematang Jaya ....	II-21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	III-1
3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	III-1
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	III-1
B. Program Kepegawaian .....	III-1
BAB IV PENUTUP .....	IV-1
4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian .....	IV-1
4.2. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan .....	IV-1
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....	IV-1
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023 ...	II-2
Tabel 2.2	Status Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	II-4
Tabel 2.3	Capaian Kinerja BKD Kabupaten Pemalang Hingga Triwulan II Tahun 2024 .....	II-5
Tabel 2.4	Status Capaian Kinerja dan Anggaran .....	II-6
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	II-7
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .....	II-7
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .....	II-7
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah .....	II-8
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2021 Triwulan II Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	II-9
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	II-9
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	II-10
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN .....	II-11
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN .....	II-12
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN .....	II-13
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur .....	II-15
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II .....	II-17
Tabel 2.17	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang ...	II-21
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2024 .....	III-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 .....	I-2
------------	--	-----

# **“Y. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024”**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis yang ada. Dinamika kondisi perekonomian dan adanya kebijakan daerah yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu disesuaikan juga. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan perencanaan tahunan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

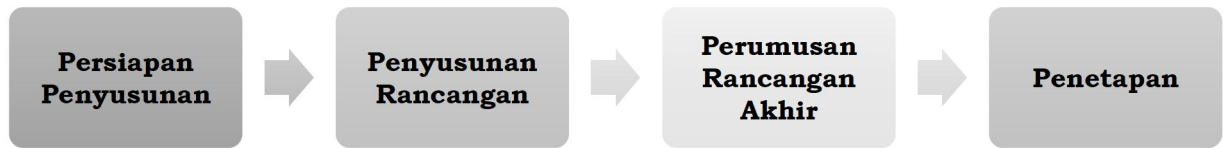
Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Pengesahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Renja selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perlu disusun perubahan Renja Tahun 2024 karena : 1) Adanya penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2024; dan 2) Adanya penyesuaian target kinerja di Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2024;
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perubahan RKPD Tahun 2024).
2. Penyusunan rancangan
  - Koordinasi dengan Bidang-bidang dan UPT Penilaian Kompetensi;
  - Desk dengan pengampu kegiatan;
  - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
3. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
  - Diverifikasi oleh Bappeda.
4. Penetapan
  - Bersama dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang  
Tahun 2024



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Jaya;
29. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
30. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
31. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024;
32. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024;



33. Keputusan Bupati Pematang Nomor 188.4/xxx/Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan perubahan RKA BKD Kabupaten Pematang Tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di BKD Kabupaten Pematang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, faktor-faktor penyebab program dengan status capaian kinerja sangat rendah dan rendah.
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan BKD Kabupaten Pematang, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan perubahan Tahun 2024 BKD Kabupaten Pematang.
4. Bab V Penutup, berisi tentang rencana tindak lanjut perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2024.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II**

BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan fungsi BKD adalah perumusan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja BKD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2022-2023 sebagai berikut :

##### **a. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)**

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 51,63 dan meningkat di tahun 2023 sebesar 65,53. Peningkatan tersebut menandakan meningkatnya kualitas ASN Kabupaten Pemalang.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2023 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih tinggi, dengan rincian di tahun 2022 IP ASN Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 54,46. Namun, di tahun 2023 dengan berbagai upaya perbaikan, Kabupaten Pemalang dapat mencapai nilai ASN yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 65,53.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Perbandingan IP ASN Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
	Rata-rata	63,79	58,24	55,61	53,43	47,7	55,75	58,58	57,96

Sumber: IP ASN BKN, 2022 dan 2023

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN Provinsi Jawa Tengah serta rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori “rendah”, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan.

b. Persentase kompetensi ASN

Dimensi yang pertama yaitu Kompetensi yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 32,2% dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 36,9%. Meskipun mengalami peningkatan, realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 57,50% sehingga tingkat capaiannya sebesar 64,17%. Hal ini disebabkan masih kurangnya ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi atau sudah mengikuti namun bukti dukung tidak diupload di Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Sehingga perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan perlu dilaksanakan sosialisasi upload bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas di Simpeg.

c. Persentase kinerja ASN

Dimensi kedua yaitu Kinerja yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 72,23% dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 83% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80,30% sehingga tingkat capaiannya sebesar 103,36%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 17% ASN yang nilai perilaku kerjanya belum sesuai dengan target pada sasaran kinerja pegawai (SKP) nya sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

d. Persentase tingkat pendidikan ASN

Dimensi ketiga yaitu Kualifikasi yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 48,32% dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 83,48% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 51,10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 163,36%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 16,52% ASN yang mempunyai tingkat pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya, sehingga perlu ditingkatkan lagi fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar bagi ASN.

e. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Dimensi keempat yaitu Kedisiplinan yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 99,7% sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,3%. Hal ini menandakan di tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat ASN yang mendapat hukuman disiplin.

f. Nilai SAKIP

Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 61,55 (baik) dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 63,1 (baik) melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 60,40 sehingga tingkat capainya sebesar 104,47%. Walaupun melebihi target, SAKIP BKD Kabupaten Pemalang masih berada pada kategori B sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk peningkatannya.

g. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Realisasi indikator ini di tahun 2022 sebesar 54,62 (kurang) sedangkan di tahun 2023 tidak dilaksanakan evaluasi IRB oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang.

h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya

Untuk meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebanyak 0,45% dan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 20,57% ASN telah meningkatkan kompetensinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3,7% sehingga tingkat capainya sebesar 555,95%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 79,43% ASN yang belum ditingkatkan kompetensinya, sehingga perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pemalang maupun yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.

i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya

Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN telah dilaksanakan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 1,44% dan sampai dengan tahun 2023 sebesar 5,49% ASN telah meningkatkan kualifikasi pendidikannya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,70% sehingga tingkat capainya sebesar 322,94%. Walaupun melebihi target, masih terdapat 16,52% ASN yang mempunyai tingkat pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya, sehingga perlu ditingkatkan lagi fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar bagi ASN.

j. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi

Untuk meningkatkan kinerja ASN telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN melalui e-kinerja dengan capaian di tahun 2022 dan 2023 sebanyak 100% ASN telah mengisi e-kinerja dan telah dievaluasi kinerjanya. Walaupun 100% ASN telah melaporkan dan dievaluasi kinerjanya, masih terdapat 17% ASN yang nilai perilaku kerjanya belum sesuai dengan target pada sasaran kinerja pegawai (SKP)nya sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

k. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya

Evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 21,65% pejabat dan akan terus dilaksanakan secara bertahap.

l. Persentase layanan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pelayanan pengadaan, pemberhentian, kenaikan pangkat, sertifikasi fungsional, diklat, pengembangan karir, pemberian tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Capaian terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di tahun 2022 sebesar 82,29%

dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 95%, hal tersebut disebabkan terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh provinsi atau pusat sehingga BKD Kabupaten Pematang Jaya hanya memfasilitasi pengajuannya.

m. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan

Selanjutnya, dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian telah digunakan sistem kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan dikembangkan setiap saat. Di tahun 2022 capaian persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebesar 67% dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 80% disebabkan masih ada sistem kepegawaian yang belum dikembangkan yaitu manajemen talenta.

n. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Indikator ini diukur dari tingkat kehadiran berdasarkan absensi, sedangkan apabila diukur dari jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga mendapatkan hukuman disiplin, tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2023 sebesar 98,65% meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 97,48%. Masih terdapat pelanggaran disiplin ASN yang terjadi, sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.

BKD Kabupaten Pematang Jaya harus berupaya meningkatkan kapabilitas birokrasi agar mencapai nilai optimal dengan meningkatkan profesionalitas ASN melalui peningkatan dimensi-dimensinya berupa kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan. Upaya yang dilakukan berupa fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; pelaksanaan mutasi dan promosi ASN; penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; serta pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Hasil evaluasi kinerja BKD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Status Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Status Pencapaian Indikator Kinerja	2024	
		Jumlah Indikator	%
1	Telah tercapai (hijau)	0	0
2	Akan tercapai (biru)	0	0
3	Perlu upaya keras (kuning)	14	100
Total Indikator		14	100

Data realisasi indikator kinerja yang belum dapat tersedia/dihitung pada triwulan II karena baru dapat dihitung di triwulan IV antara lain : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), persentase kompetensi ASN, persentase kinerja ASN, persentase tingkat pendidikan ASN, persentase tingkat kedisiplinan ASN, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya, persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya, persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi, persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya, persentase layanan administrasi kepegawaian, persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan, dan persentase tingkat kedisiplinan ASN. Capaian kinerja BKD Kabupaten Pematang Jaya tahun 2024 sampai dengan triwulan II ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja BKD Kabupaten Pemalang Hingga Triwulan II Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Tahun 2024		% Realisasi TW II Tahun 2024 Terhadap Target Tahun 2024	Status Capaian
			Target	Realisasi TW II		
Meningkatnya birokrasi kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,10	0	0	↔
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase kompetensi ASN	%	57,80	0	0	↔
Meningkatnya kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	80,30	0	0	↔
Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	51,60	0	0	↔
Meningkatnya disiplin ASN	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	99,7	0	0	↔
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	60,45	0	0	↔
	IRB	Indeks	51,45	0	0	↔
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,80	0	0	↔
	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	1,80	0	0	↔
	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100,00	0	0	↔
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,80	0	0	↔
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0	0	↔
	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100,00	0	0	↔
	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	80,00	0	0	↔

Keterangan : ★ : telah tercapai, ➡ : akan tercapai, ↔ : perlu upaya keras

## 2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
. Status Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	$47,50\% \leq$	Sangat tinggi (ST)
2	$38,76\% \leq 47,50\%$	Tinggi (T)
3	$31,26 \leq 38,75\%$	Sedang (S)
4	$22,51\% \leq 31,25\%$	Rendah (R)
5	$\leq 22,50\%$	Sangat Rendah (SR)

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di BKD Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut:

### Tahun Anggaran 2024 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan BKD Kabupaten Pemalang sebesar Rp14.381.387.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp5.490.481.828,00 atau sebesar 38,18% yang masuk dalam status **sedang**.

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja untuk program ini adalah nilai SAKIP dan IRB. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024, nilai SAKIP dan IRB Bappeda Kabupaten Pemalang belum tersedia karena penilaian akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV, sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%. Sedangkan untuk realisasi anggaran nilai SAKIP sebesar 45,88% dan IRB sebesar 27,04% sehingga rata-rata realisasi anggaran program sebesar 42,78% atau menunjukkan hasil **tinggi**.

#### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen (1 Renja, 1 Perubahan Renja, 1 RKA, 1 Perubahan RKA, 1 DPA dan 1 Perubahan DPA). Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi**

yaitu sebesar 50% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 15,81%.

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	15,81	ST	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>50,00</b>	<b>15,81</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

### Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- Capaian keuangan pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan banyak kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4.

### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen (laporan keuangan akhir tahun 2023). Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 100% dan realisasi anggaran juga menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 45,96%.

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,00	45,96	ST	ST
<b>Kegiatan</b>		<b>100,00</b>	<b>45,96</b>	<b>ST</b>	<b>ST</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

### 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen (laporan pelaksanaan sosialisasi). Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 100% namun realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0% dikarenakan pertanggungjawaban kegiatan masih dalam proses.

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	74,29	-	ST	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)



**Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :**

- Capaian keuangan pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban sosialisasi masih dalam proses.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sebanyak 45 paket. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersedia sebanyak 32 paket sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 71,11% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sedang** yaitu sebesar 31,69%.

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,00	15,35	ST	SR
2	Penyediaan bahan logistik kantor	34,29	22,40	S	SR
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,00	39,20	ST	T
4	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50,00	37,01	ST	S
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,00	9,79	ST	SR
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,00	36,69	R	S
<b>Kegiatan</b>		<b>71,11</b>	<b>31,69</b>	<b>ST</b>	<b>S</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

**Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :**

- Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan yang akan disediakan pada triwulan 3 dan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan yang akan disediakan pada triwulan 3 dan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan fasilitasi menyesuaikan jumlah tamu yang datang.
- Capaian kinerja pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan kesalahan penentuan target kinerja dan akan diubah saat perubahan Renja.

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah yang tersedia sebanyak 9 unit (2 lemari arsip, 1 kursi kerja, 1 laptop, 1 PC, 3 printer, 1 scanner). Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 belum ada realisasi sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0% dan realisasi anggaran juga menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%. Hal ini disebabkan kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2021 Triwulan II  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	0,00	-	SR	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

**Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :**

- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 4.

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 20 laporan. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun sebanyak 11 laporan sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 55% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 43,78%.

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyediaan jasa surat menyurat	66,67	44,56	ST	T
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,00	40,20	ST	T
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50,00	48,85	ST	ST
<b>Kegiatan</b>		<b>55,00</b>	<b>43,78</b>	<b>ST</b>	<b>T</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sebanyak 58 unit. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terpelihara barang milik daerah sebanyak 27 unit sehingga capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 46,55% dan realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 19,91%.

Tabel 2.11  
 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
 Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45,00	25,31	T	R
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	0,00	39,73	SR	T
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	53,33	18,49	ST	SR
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	50,00	8,54	SR	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>46,55</b>	<b>19,91</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

**Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :**

- Capaian keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan yang akan disediakan pada triwulan 3 dan 4.
- Capaian kinerja pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pemeliharaan akan dilaksanakan pada triwulan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan yang akan disediakan pada triwulan 3 dan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pemeliharaan akan dilaksanakan pada triwulan 4.

**B. Program Kepegawaian Daerah**

Indikator kinerja untuk program ini adalah : (1) persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya; (2) persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; (3) persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi; (4) persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya; (5) persentase layanan administrasi kepegawaian; (6) persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan; dan (7) persentase tingkat kedisiplinan ASN. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024, realisasi ketujuh indikator tersebut belum tersedia karena penilaian akan dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga capaian kinerja program menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 0%. Sedangkan untuk rata-rata realisasi anggaran program sebesar 30,51% atau menunjukkan hasil **rendah**.

**1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah : (1) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) sebanyak 613 dokumen; (2) Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian

sebanyak 9 dokumen. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun 269 dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) dan 3 dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian sehingga rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 43,73% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 22,17%.

Tabel 2.12  
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	0,00	-	SR	SR
2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	0,00	22,17	SR	SR
3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	0,00	23,37	SR	R
4	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	0,00	-	SR	SR
5	Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	0,00	-	SR	SR
6	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	44,10	19,53	T	SR
7	Evaluasi pemberhentian ASN	0,00	-	SR	SR
8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	0,00	-	SR	SR
9	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	0,00	-	SR	SR
10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	33,33	23,42	S	R
11	Pengelolaan data kepegawaian	25,00	15,68	R	SR
12	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	50,00	19,39	ST	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>43,73</b>	<b>22,17</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

**Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :**

- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan dokumen belum ditetapkan karena masih diajukan ke Kemen PAN-RB untuk divalidasi.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK menunjukkan hasil sangat rendah dan rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.

- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan jumlah kebutuhan menyesuaikan jumlah pegawai pensiun tiap triwulannya dan kegiatan akan terus dilaksanakan di triwulan 3 dan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi pemberhentian ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan fasilitasi dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian menunjukkan hasil rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan 4.

## 2. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah : (1) Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 9 dokumen; (2) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) sebanyak 2 dokumen. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah tersusun 9 dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN dan 3 dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) sehingga rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 109,09% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat tinggi** yaitu sebesar 63,42%.

Tabel 2.13

### Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Pengelolaan Mutasi ASN	80,00	34,21	ST	S
2	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	150,00	46,30	ST	T
3	Pengelolaan promosi ASN	125,00	70,67	ST	ST
<b>Kegiatan</b>		<b>109,09</b>	<b>63,42</b>	<b>ST</b>	<b>ST</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

### 3. Pengembangan kompetensi ASN

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah : (1) Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 1935 orang; (2) Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya sebanyak 3 orang; (3) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional) sebanyak 3 dokumen. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terfasilitasi 128 ASN yang dikembangkan kompetensinya, belum ada realisasi untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya, belum ada realisasi untuk dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional). Sehingga rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 6,59% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 27,04%.

Tabel 2.14  
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	64,00	20,30	ST	SR
2	Pengelolaan assesment center	0,00	9,72	SR	SR
3	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	0,00	-	SR	SR
4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	0,00	17,39	SR	SR
5	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	7,38	31,99	SR	S
6	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	0,00	-	SR	SR
7	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	0,00	-	SR	SR
8	Penyusunan adminitrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	0,00	-	SR	SR
9	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	0,00	-	SR	SR
10	Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	0,00	-	SR	SR
11	Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	0,00	-	SR	SR
12	Sosialiasi dan penyevbaran informasi jabatan fungsional ASN	0,00	-	SR	SR
13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	0,00	-	SR	SR
14	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	0,00	-	SR	SR
15	Evaluasi pengembangan jabatan fungsional	0,00	-	SR	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>6,59</b>	<b>27,04</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

#### Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- Capaian keuangan pada sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pengiriman peserta menyesuaikan undangan diklat dan akan terus difasilitasi di triwulan 3 dan 4.

- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan assesment center menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan uji kompetensi akan terus dilakukan di triwulan 3 dan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan belum ada pengiriman pegawai untuk mengikuti tugas belajar.
- Capaian kinerja pada sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pengiriman peserta menyesuaikan undangan diklat dan akan terus difasilitasi di triwulan 3 dan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan fasilitasi sertifikasi fungsional ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Sub kegiatan ini belum dilaksanakan karena belum ada alokasi anggaran sehingga akan diberi alokasi anggaran saat perubahan.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Sub kegiatan ini belum dilaksanakan karena belum ada alokasi anggaran sehingga akan diberi alokasi anggaran saat perubahan.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi pengembangan jabatan fungsional menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan ini akan di drop di perubahan Renja.

#### 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah : (1) Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN sebanyak 3 dokumen; (2) Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai) sebanyak 2476 orang; (3) Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN sebanyak 20 dokumen. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 belum ada dokumen hasil evaluasi kinerja ASN yang terealisasi, sebanyak 2319 ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai), dan sebanyak 5 dokumen pengelolaan disiplin ASN. Sehingga rata-rata capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil **tinggi** yaitu sebesar 39,55% dan rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **sangat rendah** yaitu sebesar 17,98%.

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Renja Tahun 2024 Triwulan II  
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No	Sub Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	0,00	-	SR	SR
2	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	0,00	35,46	SR	S
3	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	0,00	-	SR	SR
4	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	100,00	24,06	ST	R
5	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	0,00	-	SR	SR
6	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa paratur	0,00	-	SR	SR
7	Pembinaan disiplin ASN	33,33	5,29	S	SR
8	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	25,00	-	SR	SR
9	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	65,00	1,82	ST	SR
10	Evaluasi disiplin ASN	0,00	-	SR	SR
<b>Kegiatan</b>		<b>39,55</b>	<b>17,98</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (tinggi), dan ST (sangat tinggi)

#### Faktor penyebab capaian rendah dan sangat rendah :

- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian kinerja pada sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai menunjukkan hasil rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan kegiatan belum bisa di SPJ karena kesalahan saat menyusun anggaran kas.



- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 4.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pembinaan disiplin ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembinaan disiplin dilaksanakan situasional apabila ada aduan/kasus.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan pembinaan disiplin dilaksanakan situasional apabila ada aduan/kasus.
- Capaian keuangan pada sub kegiatan pelayanan proses izin perceraian pegawai menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan fasilitasi dilaksanakan di kantor BKD sehingga tidak ada pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam kota.
- Capaian kinerja dan keuangan pada sub kegiatan evaluasi disiplin ASN menunjukkan hasil sangat rendah. Hal ini disebabkan sub kegiatan dilaksanakan di triwulan 4.

Tabel 2.16  
Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan 2024		Triwulan II			
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>14.381.387.450</b>			<b>5.490.481.828</b>	<b>38,18</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>8.984.813.500</b>			<b>3.843.949.764</b>	<b>42,78</b>
		<b>Nilai SAKIP (nilai)</b>	<b>60,45</b>	<b>7.508.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.715.400</b>	<b>45,88</b>
		<b>IRB (indeks)</b>	<b>51,45</b>	<b>1.476.328.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399.234.364</b>	<b>27,04</b>
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3</b>	<b>50,00</b>	<b>3.162.900</b>	<b>15,81</b>
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	20.000.000	3	50,00	3.162.900	15,81
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>7.488.485.000</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>3.441.552.500</b>	<b>45,96</b>
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	12	7.488.485.000	6	50,00	3.441.552.500	45,96
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>92.230.000</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	-	-
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	70	92.230.000	52	74,29	-	-
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan (paket)</b>	<b>45</b>	<b>523.683.150</b>	<b>32</b>	<b>71,11</b>	<b>165.957.583</b>	<b>31,69</b>
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	8	15.000.000	4	50,00	2.303.000	15,35
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	35	160.423.150	12	34,29	35.930.210	22,40
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	25.000.000	1	50,00	9.800.000	39,20
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	2	16.750.000	1	50,00	6.200.000	37,01
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	4	2.767.500	2	50,00	271.000	9,79
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	40	303.742.500	12	30,00	111.453.373	36,69
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)</b>	<b>24</b>	<b>100.681.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	24	100.681.104	0	0,00	-	-
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)</b>	<b>20</b>	<b>343.548.000</b>	<b>11</b>	<b>55,00</b>	<b>150.416.281</b>	<b>43,78</b>
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	3	2.500.000	2	66,67	1.114.000	44,56
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	5	200.000.000	3	60,00	80.402.281	40,20
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	141.048.000	6	50,00	68.900.000	48,85

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan 2024		Triwulan II			
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)</b>	<b>58</b>	<b>416.186.246</b>	<b>27</b>	<b>46,55</b>	<b>82.860.500</b>	<b>19,91</b>
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	40	143.019.246	18	45,00	36.200.500	25,31
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit)	1	30.150.000	0	0,00	11.980.000	39,73
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	15	139.908.000	8	53,33	25.870.000	18,49
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	103.109.000	1	50,00	8.810.000	8,54
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>5.396.573.950</b>		<b>0</b>	<b>1.646.532.064</b>	<b>30,51</b>
		<b>Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)</b>	<b>3,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)</b>	<b>1,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)</b>	<b>1,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN (%)</b>	<b>80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN</b>			<b>1.673.879.300</b>		<b>43,73</b>	<b>371.030.834</b>	<b>22,17</b>
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) (dokumen)</b>	<b>613</b>		<b>269</b>	<b>43,88</b>		
		<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian (dokumen)</b>	<b>9</b>		<b>3</b>	<b>33,33</b>		
5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN (dokumen)	1	1.000.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (dokumen)	1	285.000.000	0	0,00	63.194.520	22,17
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	2	900.000.000	0	0,00	210.349.182	23,37
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN (laporan)	1	1.000.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.01.0005	Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah dokmen hasil perumusan bahan kebijakan, pemberhentian ASN (dokumen)	2	336.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian (dokumen)	610	185.328.500	269	44,10	36.201.966	19,53
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN (dokumen)	1	336.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (lembaga)	1	100.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.01.0009	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN (dokumen)	1	100.000	0	0,00	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan 2024		Triwulan II			
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian (dokumen)	3	131.600.000	1	33,33	30.825.000	23,42
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian (dokumen)	4	62.637.800	1	25,00	9.823.966	15,68
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (laporan)	2	106.441.000	1	50,00	20.636.200	19,39
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>974.157.000</b>		<b>109,09</b>	<b>617.785.696</b>	<b>63,42</b>
		<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (dokumen)</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>100</b>		
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) (dokumen)</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>150</b>		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah (dokumen)	5	60.000.000	4	80	20.524.800	34,21
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN (dokumen)	2	200.157.000	3	150	92.664.422	46,30
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (dokumen)	4	714.000.000	5	125	504.596.474	70,67
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>			<b>1.803.837.700</b>		<b>6,59</b>	<b>487.844.297</b>	<b>27,04</b>
		<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya (orang)</b>	<b>1935</b>		<b>128</b>	<b>6,61</b>		
		<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (orang)</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional) (dokumen)</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (orang)	200	70.000.000	128	64,00	14.212.900	0
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assesment center	jumlah dokumen pengelolaan assesment center (dokumen)	1	300.000.000	0	0,00	29.146.100	9,72
5.03.02.2.03.0003	pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN (dokumen)	1	100.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan (orang)	3	95.000.000	0	0	16.519.900	17,39
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat (dokumen)	1735	1.337.737.700	128	7,38	427.965.397	31,99
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan (orang)	50	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN (laporan)	1	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional (orang)	50	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0009	koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional (dokumen)	4	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0010	fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional ASN (orang)	10	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0011	Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional (dokumen)	1	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0012	sosialisasi dan penyebar informasi jabatan fungsional ASN	jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (dokumen)	1	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan jabatan fungsional ASN	jumlah ASN fungsional yang dibina (orang)	50	100.000	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan 2024		Triwulan II			
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir (orang)	50	100.000	0	0	0	0
5.03.02.2.03.0015	evaluasi pengembangan jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional (dokumen)	1	100.000	0	0	0	0
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>944.699.950</b>		<b>39,55</b>	<b>169.871.237</b>	<b>17,98</b>
		<b>Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN (dokumen)</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai) (orang)</b>	<b>2476</b>		<b>2319</b>	<b>93,66</b>		
		<b>Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN (dokumen)</b>	<b>20</b>		<b>5</b>	<b>25</b>		
5.03.02.2.04.0001	penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	1	100.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	1	290.833.600	0	0,00	103.142.551	35,46
5.03.02.2.04.0003	evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	1	100.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	jumlah ASN yang diberikan penghargaan (orang)	2306	199.442.150	2306	100,00	47.993.132	24,06
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	jumlah ASN yang diobatkan tandajasa (orang)	150	40.000.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa paratur	jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tandajasa aparatur (dokumen)	1	336.000	0	0,00	-	-
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (orang)	36	350.153.000	12	33,33	18.535.554	5,29
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (laporan)	20	51.735.200	5	25,00	-	-
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani (dokumen)	20	11.000.000	13	65	200.000	1,82
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi disiplin ASN	jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN (laporan)	1	1.000.000	0	0	0	0

### 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BKD Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. BKD Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi BKD Kabupaten Pemalang, meliputi:

- 1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di tahun 2023 sehingga nilai SAKIP BKD Kabupaten Pemalang sebesar 63,1 (baik).
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 3) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN sampai dengan tahun 2023 sehingga baru sebanyak 20,57% ASN yang meningkat kompetensinya.
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN sampai dengan tahun 2023 sehingga baru sebanyak 5,49% ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya.
- 5) Perlu dioptimalkan lagi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN.
- 6) Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang belum dievaluasi kinerjanya sampai dengan tahun 2023 sebanyak 78,35%.
- 7) Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian di tahun 2023 sehingga baru sebanyak 95% layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan.
- 8) Belum optimalnya sistem kepegawaian yang dikembangkan sehingga di tahun 2023 baru sebanyak 80% sistem kepegawaian yang dikembangkan.
- 9) Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2023 sehingga terdapat 1,35% ASN yang mendapat hukuman disiplin.

Secara rinci permasalahan pelayanan BKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD			
2	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian kepegawaian	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
			Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum
		Belum tercukupinya bahan logistik kantor	
		Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan	
		Minimnya bahan bacaan yang tersedia	
		Terdapat kunjungan tamu yang harus difasilitasi	
Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan			
Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas jabatan		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Terdapat surat-surat yang harus diadministrasi
			Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas jabatan yang harus dipelihara
			Terdapat kendaraan dinas operasional yang harus dipelihara
			Terdapat alat besar yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
3	Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	Masih terdapat ASN yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas kinerja ASN
			Belum optimalnya pengelolaan assesment center
4	Belum optimalnya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Masih terdapat ASN yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan jabatannya	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
5	Perlu dioptimalkan lagi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN	Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja ASN	Belum optimalnya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
6	Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang belum dievaluasi kinerjanya	Perlu dilaksanakan pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Belum optimalnya pengelolaan Mutasi ASN
			Belum optimalnya pengelolaan promosi ASN
7	Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian	Perlu dilaksanakan layanan pengadaan dan pemberhentian ASN	Belum optimalnya layanan pengadaan ASN
			Belum optimalnya layanan pemberhentian ASN
			Belum optimalnya fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Perlu dilaksanakan layanan kenaikan pangkat ASN	Belum optimalnya pengelolaan kenaikan pangkat ASN
		Perlu dilaksanakan layanan sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional	Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi jabatan ASN
			Belum optimalnya fasilitasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
		Perlu dilaksanakan layanan tanda jasa, penghargaan, ijin cerai	Belum optimalnya pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
			Belum optimalnya pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
			Belum optimalnya pelayanan proses izin perceraian pegawai
8	Belum optimalnya sistem kepegawaian yang dikembangkan	Belum optimalnya pengelolaan system dan data kepegawaian	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian
			Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian
9	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN	Belum optimalnya pengelolaan disiplin ASN	Belum optimalnya pembinaan disiplin ASN
			Belum optimalnya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

Adapun isu strategis BKD Kabupaten Pematang Jaya, yaitu :

1. Perlu ditingkatkannya profesionalitas ASN;
2. Perlu ditingkatkannya kompetensi ASN;
3. Perlu ditingkatkannya kinerja ASN;
4. Perlu ditingkatkannya kualifikasi pendidikan ASN; dan
5. Perlu ditingkatkannya kedisiplinan ASN.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Program yang direncanakan adalah :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adanya pengurangan anggaran sebesar Rp307.410.000,- yaitu dari anggaran sebesar Rp8.984.813.500,- menjadi sebesar Rp8.677.403.500,- menyebabkan perubahan target pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKD Kabupaten Pematang Jaya.

Akuntabilitas kinerja dinilai dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP). Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja disusun dokumen perencanaan yang berkualitas serta laporan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan. Pada penetapan tahun 2024 telah dialokasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi sebanyak 4 dokumen, namun di perubahan akan disusun sejumlah 9 dokumen meliputi : 1 Renja tahun 2025, 1 perubahan Renja tahun 2024, 1 RKA tahun 2025, 1 perubahan RKA tahun 2024, 1 DPA tahun 2025, 1 perubahan DPA tahun 2024, 1 LKjIP tahun 2023, 1 manajemen risiko tahun 2024, dan 1 evaluasi Renja 2023. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja disediakan gaji dan tunjangan untuk PNS sebanyak 45 orang dan semua kegiatan selama 1 tahun dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan.

Sedangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi perlu didukung oleh SDM yang kompeten, tercukupinya kebutuhan administrasi umum, tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan tersedianya jasa penunjang. Pada penetapan tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM BKD Kabupaten Pematang Jaya sebanyak 70 orang, namun karena banyak pegawai yang pensiun di perubahan target dirubah menjadi 45 orang. Kebutuhan administrasi umum yang harus tercukupi meliputi komponen instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetak dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu serta koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan. Sarana dan prasarana kantor yang dialokasikan pada penetapan tahun 2024 berupa peralatan dan mesin lainnya sebanyak 24 unit, di perubahan disesuaikan pembelian peralatan dan mesin lainnya menjadi sebanyak 9 unit. Jasa penunjang yang harus tersedia adalah surat menyurat, internet, PDAM, listrik dan tenaga non ASN selama 12 bulan. Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar harus didukung oleh sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Adapun barang milik daerah yang perlu dipelihara kendaraan dinas sebanyak 36 unit, alat besar sebanyak 1 unit, peralatan dan mesin lainnya sebanyak 108 unit serta gedung kantor sebanyak 2 unit.

**B. Program Kepegawaian**

Adanya penambahan anggaran sebesar Rp875.000.000,- yaitu dari anggaran sebesar Rp6.271.573.950,- menjadi sebesar Rp5.396.573.950,- menyebabkan perubahan target pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, kualifikasi pendidikan ASN, evaluasi nilai kinerja aparatur, evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi



Administrator dan Pengawas, pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan Sistem Kepegawaian, dan meningkatkan kedisiplinan ASN.

Peningkatan kompetensi ASN diupayakan melalui peningkatan kapasitas ASN yang semula ditargetkan sebanyak 200 orang menjadi 1150 orang dan pengelolaan *asesment center* selama 1 tahun. Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN diupayakan melalui fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar yang semula ditargetkan sebanyak 3 orang menjadi 75 orang. Peningkatan evaluasi nilai kinerja aparatur diupayakan melalui pembinaan, pendampingan dan evaluasi kinerja aparatur melalui e-kinerja BKD yang dilakukan setiap triwulan sehingga diharapkan aparatur yang masih memiliki nilai kinerja dibawah ekspektasi akan memperbaiki dan terjadi peningkatan kinerja di triwulan berikutnya. Sedangkan untuk evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dilaksanakan ketika akan ada promosi atau mutasi ASN. Sampai dengan triwulan II sudah terlaksana evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebanyak 5 kali dari target yang ditetapkan di penetapan 2024 sebanyak 4 kali.

Peningkatan layanan administrasi kepegawaian diupayakan melalui peningkatan layanan pengadaan dan pemberhentian ASN; kenaikan pangkat ASN; sertifikasi, diklat dan pengembangan karir jabatan fungsional; serta tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Diharapkan semua ASN yang membutuhkan layanan kepegawaian dapat terlayani dan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan dapat terbit tepat waktu. Peningkatan pengembangan sistem kepegawaian diupayakan melalui pengembangan 4 aplikasi SIMPEG (sistem kepegawaian), SIMPEG DS (Simpeg yang terkoneksi dengan BKN), SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dan MATA ASN (manajemen talenta ASN) yang semula di penetapan ditargetkan 3 aplikasi. Selanjutnya untuk peningkatan kedisiplinan diupayakan melalui pembinaan disiplin sebanyak 36 orang, penyelesaian pelanggaran disiplin sebanyak 10 orang dan pelaksanaan evaluasi disiplin selama 1 tahun.

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2024

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>14.381.387.450</b>	<b>14.948.977.450</b>	<b>567.590.000</b>	<b>3,95</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>8.984.813.500</b>	<b>8.677.403.500</b>	<b>-307.410.000</b>	<b>-3,42</b>	
		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,45</b>	<b>60,45</b>	<b>7.508.485.000</b>	<b>7.126.075.000</b>	<b>-382.410.000</b>	<b>-5,09</b>	
		<b>IRB</b>	<b>IRB</b>	<b>Indeks</b>	<b>51,45</b>	<b>51,45</b>	<b>1.476.328.500</b>	<b>1.551.328.500</b>	<b>75.000.000</b>	<b>5,08</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9	20.000.000	20.000.000	0	0,00	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.488.485.000</b>	<b>7.106.075.000</b>	<b>-382.410.000</b>	<b>-5,11</b>	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	45/12	45/12	7.488.485.000	7.106.075.000	-382.410.000	-5,11	Terdapat pegawai yang pensiun
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>92.230.000</b>	<b>93.602.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1,49</b>	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	45	92.230.000	93.602.000	1.372.000	1,49	Penyesuaian kebutuhan
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>523.683.150</b>	<b>575.858.150</b>	<b>52.175.000</b>	<b>9,96</b>	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	12	15.000.000	15.000.000	0	0,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	35	24	160.423.150	165.958.150	5.535.000	3,45	Penyesuaian kebutuhan
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Paket	2	2	25.000.000	25.647.500	647.500	2,59	Penyesuaian kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		disediakan	disediakan								
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	4	16.750.000	18.060.000	1.310.000	7,82	Penyesuaian kebutuhan
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4	2.767.500	2.767.500	0	0,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	40	12	303.742.500	348.425.000	44.682.500	14,71	Penyesuaian kebutuhan
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>100.681.104</b>	<b>100.681.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	24	9	100.681.104	100.681.104	0	0,00	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>343.548.000</b>	<b>335.772.000</b>	<b>-7.776.000</b>	<b>-2,26</b>	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	12	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	12	200.000.000	200.060.000	60.000	0,03	Penyesuaian kebutuhan
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	141.048.000	133.212.000	-7.836.000	-5,56	Penyesuaian kebutuhan
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>58</b>	<b>147</b>	<b>416.186.246</b>	<b>445.415.246</b>	<b>29.229.000</b>	<b>7,02</b>	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40	36	143.019.246	177.256.246	34.237.000	23,94	Penyesuaian kebutuhan
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	1	30.150.000	32.070.000	1.920.000	6,37	Penyesuaian kebutuhan
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	Unit	15	108	139.908.000	132.980.000	-6.928.000	-4,95	Penyesuaian kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dipelihara	dipelihara								
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	103.109.000	103.109.000	0	0,00	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>5.396.573.950</b>	<b>6.271.573.950</b>	<b>875.000.000</b>	<b>16,21</b>	
		Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,80	3,80					
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	1,80	1,80					
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100	100					
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,80	1,80					
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100					
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100					
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	80	80					
5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN						1.673.879.300	1.873.879.300	200.000.000	11,95	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	Dokumen	613	613					
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	Dokumen	9	5					
5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Dokumen	1	0	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan	Dokumen	1	1	285.000.000	263.365.000	-21.635.000	-7,59	Penyesuaian kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	2	900.000.000	1.075.872.000	175.872.000	19,54	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	Laporan	1	0	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.01.0005	Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan, pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan, pemberhentian ASN	Dokumen	2	0	336.000	0	-336.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	610	610	185.328.500	185.408.500	80.000	0,04	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	Dokumen	1	0	336.000	0	-336.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1	1	100.000	100.000	0	0,00	
5.03.02.2.01.0009	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	3	4	131.600.000	131.600.000	0	0,00	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	4	1	62.637.800	101.467.800	38.830.000	61,99	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Laporan	2	2	106.441.000	116.066.000	9.625.000	9,04	Penyesuaian kebutuhan
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>						<b>974.157.000</b>	<b>974.157.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>11</b>					
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>6</b>					
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	5	6	60.000.000	88.779.600	28.779.600	47,97	Penyesuaian kebutuhan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	2	6	200.157.000	200.157.000	0	0,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	4	5	714.000.000	685.220.400	-28.779.600	-4,03	Penyesuaian kebutuhan
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>						<b>1.803.837.700</b>	<b>2.478.837.700</b>	<b>675.000.000</b>	<b>37,42</b>	
		<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>Orang</b>	<b>1935</b>	<b>1150</b>					
		<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya</b>	<b>Orang</b>	<b>3</b>	<b>75</b>					
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>50</b>					
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	200	1150	70.000.000	480.678.400	410.678.400	586,68	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assesment center	jumlah dokumen pengelolaan assesment center	jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1	1	300.000.000	300.000.000	0	0,00	
5.03.02.2.03.0003	pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Dokumen	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	3	75	95.000.000	312.559.500	217.559.500	229,01	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Dokumen	1735	1150	1.337.737.700	1.325.755.200	-11.982.500	-0,90	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	Orang	50	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Laporan	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	Orang	50	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.03.0009	koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Dokumen	4	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0010	fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional ASN	Orang	10	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0011	Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	Dokumen	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0012	sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Dokumen	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan jabatan fungsional ASN	jumlah ASN fungsional yang dibina	jumlah ASN fungsional yang dibina	Orang	50	150	100.000	43.060.600	42.960.600	42.961	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	50	50	100.000	16.784.000	16.684.000	16.684	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.03.0015	evaluasi pengembangan jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional	jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Dokumen	1	0	100.000	0	-100.000	-100,00	Sub kegiatan tidak dilakukan
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>						<b>944.699.950</b>	<b>944.699.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN</b>	<b>Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>4</b>					
		<b>Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)</b>	<b>Orang</b>	<b>2476</b>	<b>2336</b>					
		<b>Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN</b>	<b>Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN</b>	<b>Dokumen</b>	<b>20</b>	<b>2</b>					
5.03.02.2.04.0001	penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	1	100.000	100.000	0	0,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	4	290.833.600	259.851.600	-30.982.000	-10,65	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.04.0003	evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	4	100.000	100.000	0	0,00	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih Dengan Penetapan		Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	jumlah ASN yang diberikan penghargaan	jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	2306	2306	199.442.150	230.424.150	30.982.000	15,53	Penyesuaian kebutuhan
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	jumlah ASN yang diobatkan tandajasa	jumlah ASN yang diobatkan tandajasa	Orang	150	10	40.000.000	40.000.000	0	0,00	
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa paratur	jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tandajasa aparatur	jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tandajasa aparatur	Dokumen	1	1	336.000	336.000	0	0,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Orang	36	36	350.153.000	350.153.000	0	0,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	20	10	51.735.200	51.735.200	0	0,00	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	Dokumen	20	20	11.000.000	11.000.000	0	0,00	
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi disiplin ASN	jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	Laporan	1	1	1.000.000	1.000.000	0	0,00	



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 ini adalah :

1. Perubahan Renja BKB Kabupaten Pemalang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.
2. Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

### **4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang dan UPT Penilaian Kompetensi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKAP maupun DPPA untuk tahun 2024.

Pemalang, 21 Agustus 2024  
Kepala BKD Kabupaten Pemalang

  
EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Pemalang, 21 Agustus 2024  
Kepala BKD Kabupaten Pemalang

  
EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja  
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan II berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
6	Penelaahan Penetapan Renja Perangkat Daerah	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat		v	Tidak ada usulan dari masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota		v	Tidak melaksanakan forum perangkat daerah	
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		v	Tidak ada usulan hasil Musrenbang Kecamatan	
10b	Mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
10c	Mensikronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya	v			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	v			

Pemalang, 21 Agustus 2024  
Kepala BKD Kabupaten Pemalang


  
 EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
 Pemula Utama Muda  
 NIP. 19680908 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 188.4 /2516/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018-2038;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya;
  15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
  16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
  17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024;
  18. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja; dan
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal **22 Juli 2024**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
\* Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908/199803 1 003



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 188,4/2516 /TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Nurkholik, S.E.

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
9.	Analisis Kepegawaian Penyelia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Arief Warjito
10.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Mohammad Tarmanto
11.	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Teguh Leksono, S.M.
12.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Rokhidin, S.A.P.
13.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG


 EKOPATI SANTOSO, SH, M.Kn  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680908 199803 1 003